

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal:**

- ADIATMA, Y. R. (2016). *Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Pt Asahimas Flat Glass Tbk* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).s
- Afliyan, S., & Hernawan, H. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Ceplak Kabupaten Garut* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Agus, D. (2014). *Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja*. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- AKBAR, A. A. (2021). *Collaborative Governance Untuk Peningkatan Kualitas pelayanan Transportasi Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Anshar, M. Y. (2018). *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)
- Arianti, D. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul*. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 6(2), 195-208.
- BPJSTK. (2016). *Panduang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan*.
- Crowther, David (2008) *Corporate Social Responsibility*. Gulen Aras & Ventus Publishing Aps
- Dwiyanto, Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance*. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 2.

- Fairuz, R. A., Faachira, F., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). *Corporate Social Responsibility di PT. Prudential Life Assurance*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(3), 251-259.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*
- H. Islamy, La Ode Syaiful. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. DEEPUBLISH.
- Irawan, F. B. (2020). *Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati*.
- Keban, Y.T., 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Gava Media.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN), Jakarta.
- Novianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. Pekanbaru Riau: LPPM Uin Suska, h, 16*.
- Prayitno, U. S. (Ed.). (2015). *Corporate social responsibility: konsep, strategi, dan implementasi*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance*. Surakarta: Smart Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2020). *Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja*. PREPOTIF J. Kesehat. Masy, 4(1), 78-84.
- Stoker, G. (1998). *Governance as theory: five propositions*. *International social science journal*, 50(155), 17-28.
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahyunengseh, R. D. (2019). *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Collaborative Governance*.4
- World Business Council for Sustainable Development. (2000). *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense*. WBSCD
- Yaffee, S. L., & Wondolleck, J. M. (2010). *Collaborative Ecosystem Planning Processes In The United States: Evolution And Challenges*. *Environments: a journal of interdisciplinary studies*, 31(2).

**Peraturan Undang-Undangan:**

Republik Indonesia. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

# L A M P I R A N

**i. Biodata Peneliti**



**Biodata**

**Identitas Diri:**

Nama : Fathur Rachman J  
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 20 september 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jl. Usman Salengke, Gowa  
No. Handphone : 082347172626  
E-mail : fatthurr20@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

2006 – 2007 : TK Aisyiah Bustanul Athfal Gowa  
2007 – 2013 : SD Negeri Bontakamase  
2013 – 2015 : SMP Negeri 1 Sungguminasa  
2016 – 2019 : SMA Kartika XX-1 Makassar  
2019 – 2023 : Universitas Hasanuddin

**Riwayat Organisasi:**

1. Anggota BASIS FISIP UNHAS 2020 – 2022
2. Anggota Empowerment Community FISIP UNHAS 2021
3. Anggota Public relations GenBI UNHAS 2022 – 2023

ii. Dokumentasi













PEDOMAN WAWANCARA

5 Indikator proses kolaborasi

Indikator	No.	Pertanyaan	Informan
Face to Face dialogue	1.	Sebagai <i>leading sector</i> dalam program Paraikatte, bagaimana Disnaker melakukan pertemuan dengan pihak yang terlibat?	Disnaker Kota Makassar
	2.	Pada pertemuan yang dilakukan, siapa saja yang ikut terlibat pada pertemuan tersebut? Apakah hanya BPJSTK atau perusahaan dan pekerja juga terlibat?	
	3.	Apakah pertemuan tersebut rutin dilakukan?	
	4.	Dalam pertemuan tersebut, pembahasan apa saja yang dikemukakan dengan para <i>stakeholder</i> ?	
	5.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pertemuan dengan <i>stakeholder</i> yang terkait?	
	1.	Bagaimana pertemuan awal dengan pihak Disnaker Kota Makassar?	Khusus Kabid dan AR BPJSTK Cab Makassar
	2.	Sebagai pelaksana dari program Paraikatte, bagaimana BPJSTK melaksanakan diskusi dengan pihak" yang terkait, khususnya dengan UNIMERZ?  *Mengikuti pertanyaan 3-5 (Disnaker)	BPJSTK Cab. Makassar  (Kabid, AR, dan ARK)
	3.	Salah satu yang dilakukan BPJSTK Cab. Makassar dalam melakukan pertemuan ialah dengan mengadakan sosialisasi. Dalam kegiatan tersebut, apakah pihak pekerja juga diikuti?	
	4.	Dalam pelaksanaan program, bagaimana ARK berperan dalam pertemuan yang dilakukan kepada pihak yang terkait dalam pembahasan program Paraikatte ini?	Khusus ARK
	1.	Bagaimana pihak UNIMERZ dalam melakukan pertemuan dengan pihak BPJSTK terkait pembahasan program Paraikatte ini?	UNIMERZ
	2.	Pada pertemuan tersebut, apakah pihak anda juga membahas terkait <i>benefit</i> yang didapatkan selama mengikuti program ini?	
	3.	Apakah terdapat kendala yang didapatkan selama pertemuan?	
		1.	Apakah anda diikuti dalam pertemuan (diskusi, sosialisasi) terkait program Paraikatte?
	2.	Pertanyaan impromptu.	
Trust Building	1.	Bagaimana Disnaker mempercayai BPJSTK sebagai eksekutor pada program Paraikatte ini?	Disnaker

	2.	Seiring dengan belum adanya payung hukum yang mewajibkan perusahaan untuk mengikuti program paraikatte, apakah ada dasar pertimbangan lain disnaker untuk tetap menjalankan program Paraikatte?	
	1.	Bagaimana BPJSTK cab Makassar meyakinkan perusahaan untuk dapat bergabung dalam program Paraikatte?	BPJSTK
	2.	Apakah dengan menjalankan program Paraikatte, BPJSTK yakin dengan perusahaan yang ikut terlibat, mengingat payung hukum atau dasar yuridis belum ada?	
	1.	Mengapa perusahaan anda percaya untuk ikut dalam program Paraikatte?	UNIMERZ
	2.	Apakah ada benefit dari ikut program ini? Atau ikut program Paraikatte karena murni dorongan nurani untuk melindungi pekerja informal?	
	1.	Bagaimana anda mempercayai UNIMERZ dan BPJSTK Makassar untuk mengakses/memberikan data pribadi anda untuk program Paraikatte?	Pekerja
	2.	Pertanyaan impromptu	
Commitment to Process	1.	Dengan hadirnya program ini, apa yang akan dilakukan pihak Disnaker untuk menyukseskan program ini?	Disnaker
	2.	Impromptu	
	1.	Apa yang akan dilakukan BPJSTK untuk membangun kesadaran tiap pihak yang terlibat bahwa program Paraikatte ini untuk kepentingan bersama?	BPJSTK
	2.	Jika terjadi kondisi perusahaan tidak mengikuti skema yang sudah ada, bagaimana BPJSTK menanggapi hal tersebut?	
	3.	Pertanyaan impromptu sesuai jawaban 2	
	1.	Bagaimana pertimbangan perusahaan anda dalam melindungi pekerja sebanyak 597 TK?	UNIMERZ
	2.	Apakah dana yang telah dikeluarkan pada dasarnya sudah ditargetkan dari awal untuk melindungi pekerja informal? Atau baru dialokasikan setelah melakukan pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan?	
	3.	Apakah pihak anda juga menyadari bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pekerja informal?	
	1.	Bagaimana anda dalam memberikan data pribadi kepada pihak BPJSTK atau UNIMERZ?	Pekerja
Shared Understanding	1.	Tanpa adanya peraturan yang mengikat pada program ini, bagaimana disnaker kemudian menyamakan pandangan pada stakeholder yang terlibat?	Disnaker

	2.	Apakah hasil dari program ini akan memberikan manfaat kepada yang ikut terlibat?	
	3.	Apakah ada Langkah selanjutnya untuk mengikat perusahaan dalam memberikan csr untuk melindungi pekerja informal?	
	4.	Bagaimana output dan impact dari program paraikatte ini?	
	1.	Sebagai eksekutor, disamping memberikan pemahaman yang konkrit kepada perusahaan yang terlibat, apakah BPJSTK juga turut memberikan pemahaman kepada para pekerja yang akan didaftarkan menjadi peserta?	BPJSTK
	2.	Apakah dalam proses perlindungan, BPJSTK hanya akan melihat kuantitas saja tanpa melihat urgensi kebutuhan pekerja yang membutuhkan perlindungan secepatnya?	
	3.	Apakah dalam proses diskusi/berjalannya akuisisi kepesertaan, BPJSTK melakukan inovasi skema untuk mempermudah langkah akuisisi kepesertaan?	
	4.	Apa output dan impact dari program ini?	
	5.	Pertanyaan sesuai dengan jawaban no.4 (Impromptu)	
	1.	Dari pihak UNIMERZ sendiri, bagaimana mana melihat urgensi dari perlindungan ketenagakerjaan ini?	UNIMERZ
	2.	Impromptu	
	1.	Apakah anda tau tentang program BPJSTK? Jika iya, seberapa penting program tersebut untuk anda?	Pekerja
	2.	Apakah anda tahu tentang paraikatte?	
	3.	Sehubungan dengan perlindungan yang dilakukan hanya daam jangka waktu tertentu, apakah anda akan melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri?	
Intermediates Outcomes	1.	Apakah setelah program ini hadir, peningkatan kepesertaan pekerja juga turut meningkat?	Disnaker
	2.	Apakah dari program ini, pemerintah melihat perlu untuk membuat peraturan yang terkait agar dapat melindungi pekerja informal?	
	1.	Dengan memberikan penawaran skema yang lebih mudah kepada perusahaan, apakah ada potensi serta inovasi lain untuk melindungi para pekerja informal ini?	BPJSTK
	1.	Apakah perusahaan anda kedepannya akan memberikan akan terus terlibat? mengingat output dan impact yang ada cukup besar.	UNIMERZ
	IMPROMPTU		





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 16332/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Rektor Univ. Megarezky Makassar  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2188/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : FATHUR RACHMAN J.  
Nomor Pokok : E011191073  
Program Studi : Administrasi Publik  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PARAIKATTE DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 30 Mei s/d 30 Juni 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 30 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. Peringgal.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor	: 13614/S.01/PTSP/2023	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	1. Walikota Makassar
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar
		3. Pimpinan PT Makassar Global Awal Bros
		di-
		<b>Tempat</b>

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 2188/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FATHUR RACHMAN J.
Nomor Pokok	: E011191073
Program Studi	: Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PARAIKATTE DALAM MENJAMIN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Maret s/d 19 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 17 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth  
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;  
2. Pertinggal.